

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK
LOKAL (STUDI KASUS: BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK)**

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT
POLICIES THROUGH LOCAL ELECTRONIC CATALOGUE
APPLICATION (CASE STUDY: PROCUREMENT SECTION OF
THE REGIONAL SECRETARIAT OF GRESIK DISTRICT)**

Muhammad Wildan Yulian¹, Prasetyo Isbandono²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: muhammadwildan.20047@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya email:
prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Aplikasi katalog elektronik lokal adalah aplikasi belanja online yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan. Hadirnya aplikasi tersebut diharapkan menjadi solusi dalam proses pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik lokal di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum terlaksana dengan baik, salah satu standar keberhasilannya yaitu dari besaran jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang mendaftar katalog elektronik. Namun, jumlahnya belum mencapai target. Sumber daya belum terlaksana dengan baik, jumlah ketersediaan pegawai yang terlibat belum mencukupi. Komunikasi antar organisasi sudah terlaksana dengan baik, komunikasi internal dan eksternal berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Karakteristik badan pelaksana sudah terlaksana dengan baik, para implementor sudah memiliki kompetensi yang memadai, adanya dukungan kebijakan, serta tanggapan positif dari penerima kebijakan. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi sudah terlaksana dengan baik. Terkait lingkungan sosial, pelaku usahanya memahami manfaat dan memberikan dukungan. Terkait lingkungan politik, birokrasi menjadi lebih optimal dan juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Terkait lingkungan ekonominya membantu menciptakan peluang usaha baru yang dapat meningkatkan penghasilan. Disposisi/sikap para pelaksana sudah terlaksana dengan baik, pemahaman implementor terhadap kebijakan, arah respon, dan intensitas respon, semuanya menunjukkan hasil yang positif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Katalog Elektronik

Abstract

The local electronic catalogue application is an online shopping application that is compiled and managed by the local government to meet the needs of government agencies. The presence of the application is expected to be a solution in the process of procuring goods / services that are more effective, efficient, transparent, and accountable. The purpose of this study is to analyze the implementation of government goods/services procurement policies through the local electronic catalogue application in the Goods/Services Procurement Section of the Gresik Regency Regional Secretariat. This type of research is descriptive qualitative. Data collected using interview, observation, and documentation techniques. This research uses the theory of Van Meter and Van Horn. The results showed that the standards and objectives of the policy have not been implemented properly, one of the success standards is the number of Micro, Small and Cooperative Enterprises that register for electronic catalogue. However, the number has not reached the target. Resources have not been implemented well, the number of available employees involved is not sufficient. Inter-organizational communication has been well implemented, internal and external communication runs smoothly without obstacles. The characteristics of the implementing agency have been carried out well, the implementors already have sufficient competence, there is policy support, and positive responses from policy recipients. The social, political, and economic environment is well implemented. Regarding the social environment, business actors understand the benefits and provide support. Regarding the political environment, the bureaucracy becomes more optimal and also gets support from the local government. Regarding the economic environment, it helps create new business opportunities that can increase income. The disposition/attitude of the implementers has been well implemented, the implementers' understanding of the policy, the direction of the response, and the intensity of the response all show positive results.

Keywords: Policy Implementation, Procurement of Goods/Services, Electronic Catalogue

Pendahuluan

Teknologi informasi sangat berdampak pada aspek kehidupan manusia dan lingkungannya karena dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang ada, tak terkecuali pelayanan publik. Pelayanan publik ialah aktivitas yang diterapkan dalam melayani suatu kepentingan yang individu atau golongan perlukan (Hardiansyah, 2018). Pemerintah telah menggunakan media elektronik yang merupakan bagian dari teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal dengan tujuan mencapai sistem pemerintahan yang lebih modern, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang biasa disebut dengan *E-Government*. *E-Government* juga memiliki arti yaitu seluk beluk mengenai pemerintah yang dapat dibawa ke dalam dunia berbasis internet dan bekerja kapan saja melalui internet (Indrajit, 2016).

E-Government tentu dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan Good Governance. Mardiasmo menjelaskan *Good Governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat serta bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta efisiensi pasar (Pasolong, 2019). Hal ini mencakup pencegahan distribusi serta investasi

yang tidak tepat serta mencegah korupsi baik dari segi politik maupun administratif. Selain itu, *Good Governance* juga melibatkan penerapan disiplin anggaran yang ketat serta penciptaan kerangka hukum dan politik yang kondusif bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, manajemen pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan transparan, sehingga mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Menurut Wirawan *E- Government* bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang terbuka dan akuntabel dengan kebijakan yang terfokus dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Allifayah & Prastyawan, 2023).

E-Government juga berkaitan erat dengan kebijakan. Salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam konteks ekonomi adalah pengadaan barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa ini merupakan suatu proses di mana Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menggunakan dana dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan barang/jasa mereka melalui penyedia yang disetujui, dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas

Saat ini, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi elektronik yang disebut *e-procurement*. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa secara online. Salah satu komponennya adalah katalog elektronik. Katalog elektronik yaitu sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Katalog ini memuat informasi berupa spesifikasi teknis, daftar, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk berstandar SNI, produk dalam negeri, produk industri hijau, harga, negara asal, penyedia, serta informasi lain terkait barang/jasa. Katalog elektronik juga diartikan sebagai aplikasi belanja online yang diperuntukkan untuk memenuhi segala kebutuhan instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, katalog elektronik terdiri dari tiga jenis, yaitu katalog elektronik nasional yang dibuat dan diatur oleh LKPP, katalog elektronik sektoral yang dikelola oleh kementerian/lembaga, dan katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kehadiran katalog elektronik ini menjadi salah satu wujud keseriusan Pemerintah Daerah sebagai dukungan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) semakin berkembang dan bersaing. Katalog elektronik lokal memberikan peluang kepada masing-masing pemerintah daerah agar tidak hanya menawarkan barang atau jasa produk industri berskala besar tetapi juga memberikan peluang yang sama kepada para pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) untuk dapat menawarkan produk barang atau jasanya yang dapat diakses oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Katalog elektronik diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi (UMKK) untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu daerah yang mempunyai potensi UMKM yang cukup besar yaitu Kabupaten Gresik.

Dalam implementasi kebijakannya di Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan katalog elektronik lokal mengalami beberapa permasalahan atau hambatan yaitu kurangnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang terdaftar dalam katalog elektronik. Kebijakan ini terkait dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan utama peraturan tersebut adalah untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) memasarkan produk mereka melalui aplikasi Katalog Elektronik Lokal. Data yang didapatkan dari <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/> diketahui untuk jumlah pelaku UMKK di Gresik yang terdaftar berjumlah 701 per 4 Februari 2024. Sedangkan, untuk target dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sendiri memiliki target sebanyak 800 pelaku UMKK. Itu artinya setidaknya perlu tambahan sekitar 14% untuk mencapai target yang diharapkan.

Lalu, Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Peraturan tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memanfaatkan adanya katalog elektronik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala infrastruktur TIK yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Contohnya, peneliti mengamati proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di mana ada yang membutuhkan waktu lebih lama karena kendala *server*.

Beberapa permasalahan di atas, diperlukan penelitian mendalam terhadap implementasi yang diterapkan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Sehingga, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Aplikasi Katalog Elektronik Lokal (Studi Kasus: Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik)”**. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo serta dokumen lainnya (Moleong, 2017). Lokasi penelitian dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik selama kurang lebih 4 bulan, sejak Februari-Mei 2024. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung

melalui wawancara dengan informan yang bersangkutan dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Adapun penentuan informan melalui *purposive sampling*, dengan subyek pegawai yang terlibat dalam pengelolaan katalog elektronik. Berikut adalah pegawai yang terlibat: Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Penyetaraan, Pranata Teknologi Informasi Komputer, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama. Selain itu, informan lain yang terlibat adalah tiga pelaku UMKK yang terdaftar dalam katalog elektronik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipan, di mana peneliti berpartisipasi langsung dalam objek yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak terkait dengan menggunakan dokumentasi untuk membantu melengkapi data penelitian. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Harahap, 2020). Untuk mengetahui penelitian ini lebih lanjut fokus penelitian ini merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan. Berkaitan dengan standar atau ukuran keberhasilan dan tujuan dari adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik.
2. Sumber daya. Berkaitan dengan SDM yang mendukung implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik serta sumber daya finansial dan non-finansial/sumber daya waktu yang tersedia dalam menunjang keberhasilan kebijakan tersebut.
3. Komunikasi antar organisasi. Berkaitan dengan koordinasi antar pelaksana dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik serta komunikasi dengan masyarakat.
4. Karakteristik badan pelaksana. Berkaitan dengan instansi pemerintahan yang meliputi pelaksana atau implementor pengadaan barang/jasa melalui aplikasi katalog elektronik, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pelaksana atau implementor tersebut.
5. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Berkaitan dengan objek sasaran dan masyarakat pengguna aplikasi katalog elektronik, dukungan pimpinan terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi katalog elektronik.
6. Disposisi/sikap para pelaksana. Berkaitan dengan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik, arah respon, dan juga intensitas respon.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengkaji implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur berdasarkan seberapa jauh standar dan tujuan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di tingkat pelaksanaan. Jika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu idealistik untuk diterapkan oleh masyarakat, maka mencapai kesuksesan dalam kebijakan publik akan menjadi sukar diterapkan (Agustino, 2020). Dalam penelitian ini diketahui bahwa yang menjadi standar/ukuran keberhasilan dari kebijakan tersebut ialah dari besaran jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam katalog elektronik dan juga dari kemudahan dalam penggunaan aplikasinya. Namun, pada besaran pelaku usahanya belum mencapai target yang diharapkan, dimana target yang diharapkan adalah 800 pelaku usaha. Sedangkan, yang terdaftar baru mencapai 701 pelaku usaha.

Di sisi lain dari kemudahan penggunaan aplikasi, pelaku usaha yang peneliti wawancarai semuanya menjawab bahwa penggunaan aplikasinya mudah. Terkait tujuan dari kebijakan katalog elektronik diketahui ialah menciptakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien, di mana bisa dilaksanakan secara online yang dapat menghemat waktu serta biaya. Selain itu, juga lebih akuntabel karena aplikasi ini mencatat setiap transaksi dan interaksi yang terjadi di dalamnya secara elektronik, yang pada akhirnya menciptakan jejak audit yang kuat. Lalu, katalog elektronik dapat menjadi media atau *platform* yang memfasilitasi atau mewedahi para pelaku usaha untuk berkecimpung dalam pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintahan

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan kesuksesan dalam menerapkan kebijakan terdapat dependensi dengan kesanggupan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Agustino, 2020). Sumber daya terdiri dari tiga aspek, yakni sumber daya manusia. Edward III mengatakan kegagalan yang acap kali timbul dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi (Agustino, 2020). Total pegawai yang mengelola katalog elektronik berjumlah enam orang. Oleh karena itu, jumlah SDM yang mengelola katalog elektronik terbilang masih kurang. Sehingga, membutuhkan tambahan pegawai lagi. Terkait proses rekrutmen (penetapan tim) pegawai yang terlibat dalam pengelolaan katalog elektronik didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Nomor 027/01/437.23/2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan bahwa ada prosedur formal yang harus diikuti dalam pengangkatan mereka. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan katalog elektronik juga mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi melalui seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh LKPP. Contohnya, Seminar Peningkatan Kapasitas (PenTas) Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa dengan Tema “Optimalisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E- Purchasing” dan juga Pelatihan Kompetensi Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa. Jadi, tiap-tiap pegawai tersebut sudah dibekali kompetensi yang diperlukan

dalam menjalankan program aplikasi katalog elektronik. Ini adalah langkah positif untuk meningkatkan kualitas layanan dan keahlian pegawai.

Lalu, sumber daya finansial. Sumber anggaran untuk pelaksanaan kebijakan aplikasi katalog elektronik sebagian besar berasal dari APBD Kabupaten Gresik dan sebagian kecil dari dana alokasi khusus dari APBN. Adapun alokasi anggaran tersebut harus sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yang direncanakan dalam dokumen pengadaan anggaran. Proses ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dalam penentuan alokasi anggaran agar kebutuhan operasional terpenuhi secara efektif. Disesuaikannya alokasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perencanaan pendek, menengah, dan panjang lainnya, menekankan pada keselarasan antara program-program yang diusulkan dengan visi pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sejauh ini tidak memiliki kendala terkait anggaran.

Selanjutnya, sumber daya waktu. Dalam hal ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah memanfaatkan sumber daya waktu dengan baik. Proses pendaftaran biasanya diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jika semua berkas persyaratan yang diserahkan pelaku usaha sudah lengkap. Namun, adanya gangguan dari jaringan atau *server* bisa memperlambat proses tersebut, hal tersebut menjadi faktor yang di luar kendali mereka karena yang memegang kendali adalah pihak IT dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP. Selain itu, pihak Bagian Pengadaan Barang/Jasa juga responsif terhadap konsultasi yang dilakukan oleh penyedia, baik melalui *platform online* seperti *WhatsApp* maupun secara langsung sesuai dengan antrian.

3. Komunikasi antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn menjelaskan koordinasi adalah hal yang sangat penting untuk berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses ini, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan (Agustino, 2020). Komunikasi internal antara pegawai yang terlibat dalam pengelolaan katalog elektronik terlihat berjalan lancar. Dengan adanya tim kerja dan saluran komunikasi internal yang baik, seperti grup *WhatsApp*, pegawai dapat berkolaborasi dan berbagi informasi dengan efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangani kendala yang muncul dalam proses pelayanan dengan cepat dan efisien. Begitu pula dengan komunikasi eksternal yang berjalan dengan baik antara Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan instansi lain, seperti Kementerian PUPR, Bagian Hukum, dan Bagian Pembangunan. Selain komunikasi internal dan eksternal, pihak terkait juga cukup aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik secara *online* ataupun *offline*.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Badan pelaksana tidak hanya meliputi organisasi formal, tetapi juga organisasi informal yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan publik (Agustino, 2020).

Dalam hal ini, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menjadi fokus penelitian sebagai pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik. Diketahui pegawai yang terlibat telah mengikuti berbagai kompetensi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Adapun terdapat kebijakan yang mendukung dari pemerintah daerah, seperti penerbitan Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, yang memberikan landasan hukum dan dukungan institusional yang diperlukan bagi pelaksanaan kebijakan. Lalu, melalui wawancara dengan para implementor, terungkap bahwa pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi masing-masing dalam implementasi kebijakan sangat penting. Selain itu, terdapat tanggapan positif dari pengguna aplikasi katalog elektronik.

5. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Aspek-aspek yang cukup substansial untuk dicermati dalam penerapan kebijakan menurut sudut pandang dari Van Meter dan Van Horn yakni seberapa jauh kondisi lingkungan eksternal menopang keberhasilan sebuah kebijakan yang telah ditentukan (Agustino, 2020). Jika situasi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi kurang mendukung, akan mengakibatkan kegagalan dalam implementasi kebijakannya. Oleh sebab itu, kebijakan perlu mencermati aspek-aspek dari lingkungan eksternal yakni, lingkungan sosial. Dari hasil wawancara peneliti, diketahui pelaku usaha yang telah memahami manfaat dari katalog elektronik dan bersedia untuk mendukung serta berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Pernyataan dari para pelaku usaha yang telah dipaparkan menunjukkan sikap positif dan komitmen mereka terhadap katalog elektronik. Mereka menyadari manfaat program ini dalam meningkatkan ketepatan, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pernyataan tersebut juga mencerminkan kesediaan mereka untuk mematuhi prosedur dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan katalog elektronik.

Lalu, lingkungan politik. Melalui wawancara dengan implementor, ditemukan bahwa aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pencarian produk dan proses audit, serta memberikan ruang bagi penyedia untuk mengembangkan usahanya. Salah satu temuan utama adalah bahwa aplikasi katalog elektronik mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dengan mengurangi kompleksitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, kesuksesan implementasi aplikasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungandari pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan dukungan aktif terhadap penggunaan aplikasi katalog elektronik. Bupati Gresik secara konsisten mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Aplikasi katalog elektronik dalam hal ini berdampak signifikan pada lingkungan ekonomi masyarakat. Implementasi katalog

elektronik membawa perubahan positif dalam aspek ekonomi yang komprehensif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi ini memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk memulai usaha dari rumah. Ini menciptakan keterbukaan dan aksesibilitas yang lebih besar terhadap pasar bagi para pengusaha. Selain itu, penggunaan katalog elektronik juga membawa kontribusi positif terhadap penertiban pembayaran pajak. Dengan adanya integrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pada gilirannya, meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak pada peningkatan APBD.

6. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan disposisi pelaksana berhubungan dengan pemahaman pelaksana, arah respon, dan juga intensitas respon terhadap suatu kebijakan atau program (Widodo, 2021). Berkaitan dengan pemahaman para pelaksana/implementor yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka telah mempelajari prosedur-prosedur terkait dan mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang perubahan dalam sistem dan regulasi. Jadi, dapat diketahui bahwa mereka telah memiliki pemahaman yang baik. Adapun arah respon sendiri dibagi menjadi tiga yakni menerima, netral, dan menolak. Dalam hal ini semua implementor memberikan respon menerima. Jadi, mereka memahami dan mendukung penuh kebijakan yang diimplementasikan. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang positif dan memiliki komitmen untuk menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan intensitas respon. Para pelaksana juga menunjukkan responsifitas yang kuat terhadap kebijakan katalog elektronik. Mereka tidak hanya menerima kebijakan tersebut, tetapi juga aktif mendukungnya. Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dari para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan.

Penutup

Berdasarkan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik lokal di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata proses penerapannya berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Untuk lebih rincinya peneliti akan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan menunjukkan belum terlaksana dengan baik, di mana pada aspek standar/ukuran keberhasilan jumlah penyediannya masih kurang dari target yang diharapkan. Namun, untuk segi penggunaan aplikasinya dapat dikatakan baik berdasarkan keterangan dari informan.
2. Sumber daya menunjukkan belum terlaksana dengan baik karena pada aspek sumber daya manusia, jumlah ketersediaan pegawai dinilai masih belum mencukupi. Namun, pada aspek yang lain meliputi sumber daya finansial dan sumber dayawaktu sudah terlaksana dengan baik. Aspek sumber daya finansial tidak ada hambatan yang berkaitan

dengan anggaran atau biaya dalam pelaksanaannya. Sedangkan, pada aspek sumber daya waktu, penyedia cenderung puas dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanannya.

3. Komunikasi antar organisasi menunjukkan sudah terlaksana dengan baik, di mana komunikasi atau koordinasi yang dilakukan, baik antar implementor atau pelaksana kebijakan maupun antar instansi lain yang terlibat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Selain itu, pihak pelaksana juga mengadakan sosialisasi agar katalog elektronik dapat dikenal luas.
4. Karakteristik badan pelaksana menunjukkan sudah terlaksana dengan baik, di mana implementor telah memahami dan berkompeten dalam bidangnya, adanya kebijakan yang mendukung seperti peraturan bupati, dan juga tanggapan positif dari pengguna aplikasi katalog elektronik yang mengindikasikan bahwa kerjasama antara pelaksana lapangan dan pemerintah daerah telah berjalan baik.
5. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi menunjukkan sudah terlaksana dengan baik, di mana dalam lingkungan sosialnya, penyedia mampu memahami manfaat yang diberikan. Lalu, untuk lingkungan politiknya, birokrasi berjalan dengan lebih efisien dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sedangkan, untuk lingkungan ekonominya membantu menambah peluang usaha dan penghasilan bagi penyediannya.
6. Disposisi/sikap para pelaksana menunjukkan sudah terlaksana dengan baik, dimana pemahaman implementor terhadap kebijakan, arah respon, dan intensitas respon, semuanya menunjukkan hasil yang positif.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi katalog elektronik lokal di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mencapai kesuksesan sesuai dengan tujuan yang diraih. Adapun saran-saran yang diberikan peneliti antaralain:

1. Dalam upaya peningkatan jumlah penyedia yang mendaftarkan katalog elektronik, perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan dan menyeluruh ke tiap-tiap kecamatan. Selain itu, di dalam sosialisasi ada baiknya berkolaborasi dengan instansi lain. Seperti, berkolaborasi dengan Diskoperindag yang dapat memberikan pembinaan dalam pengembangan usaha.
2. Menghimbau kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk menambah atau merekrut pegawai baru dalam membantu pengelolaan katalog elektronik. Kekurangan jumlah pegawai cukup mempengaruhi kualitas pelayanan. Diharapkan dengan adanya ketersediaan pegawai yang memadai dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui aplikasi Katalog Elektronik. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang mungkin terjadi selama proses implementasi.

Referensi

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. CV. Alfabeta.
- Allifiyah, R. A., & Prastyawan, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi WargaKu Surabaya (Studi Kasus: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya)* (Vol. 1).
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Gava Media.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.